TAJUK RENCANA

Kreatif Mewariskan Nilai Kepahlawanan

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya," kutipan dari pidato presiden pertama RI, Soekarno, pada 10 November 1961 itu selalu bergaung kembali pada 10 November, hari yang ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Bertepatan dengan 10 November 2014, perenungan terhadap pahlawan dan penghargaan kepada pahlawan menemukan waktu yang tepat untuk membongkar kembali pemahaman tentang kepahlawanan dan kesesatan mitos yang menyertainya.

Pemerintah memperingati Hari Pahlawan dengan cara menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi tokoh-tokoh, biasanya adalah tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan. Pemberian gelar itu penting karena menunjukkan kepedulian pemerintah kepada mereka yang telah berjasa kepada bangsa, yang mengorbankan jiwa dan kehidupannya sebagai pribadi untuk kepentingan masyarakat. Tetapi, seremoni penganugerahan pahlawan berisiko kontraproduktif pula.

Disebut kontraproduktif karena seremoni gelar pahlawan nasional itu secara implisit mengajarkan konsep kepahlawanan yang hanya terikat pada masa lampau dan secara lebih khusus, terikat pada perjuangan pembentukan negara Indonesia. Pahlawan, dalam konsep formal, menjadi hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan sejarah pemberontakan atas kolonialisme. Nilai kepahlawanan menjadi terasing dari hakikat kehidupan bernegara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan didefinisikan sebagai "orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani." Kepahlawanan diartikan sebagai "perihal sifat pahlawan (seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan)." Definisi itu sangat kuat bersandar pada makna dasar perjuangan fisik, maskulinitas, dan menawarkan pemahaman yang terbatas.

Keterbatasan pemahaman itu berakibat pula pada keterbatasan pewarisan nilai-nilai kepahlawanan. Keluhan para pendidik-pengajar atau para generasi senior tentang kelunturan nilai-nilai kepahlawanan pada masa kini barangkali bersumber pula pada pereduksian pewarisan nilai-nilai kepahlawanan. Padahal, pewarisan nilai kepahlawanan tidak terbatas pada penganugerahan gelar pahlawan nasional atau ziarah ke makam pahlawan.

Tidak pula upacara pemberian bantuan kepada para veteran karena hal itu sesungguhnya sudah merupakan kewajiban pemerintah. Setiap cerita membutuhkan pahlawan. Demikian pula, setiap zaman melahirkan pahlawan apabila suatu bangsa secara kreatif selalu merumuskan nilai kepahlawanan sesuai zaman. Generasi masa kini makin galau memahami kepahlawanan karena konsep nilai kepahlawanan terasa makin jauh, makin asing, dan tidak nyata.

Memilih Jalan Melawan Korupsi

Kisah Ronny Maryanto, Koordinator Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah yang dijadikan tersangka kasus pencemaran nama baik, adalah bagian dari lika-liku perjuangan dengan segala konsekuensi atas jalan yang telah dipilih. Ia, yang dalam kampanye Pemilihan Presiden 2014 lalu melaporkan Fadli Zon ke Panwaslu Kota Semarang atas dugaan politik uang, balik diadukan dan ditersangkakan.

Proses hukum yang harus dihadapi oleh Ronny merupakan salah satu bentuk "risiko perjuangan" melawan korupsi, bahkan tak sedikit yang diteror dengan ancaman fisik berupa penganiayaan, seperti yang pernah dialami aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun. Teror terhadap pribadi aktivis, keluarga, dan organisasi menjadi "menu" yang setiap saat bisa disantap. Hanya, kasus Ronny Maryanto memuat bobot persoalan tersendiri.

Berbagai kalangan mendesak Fadli Zon mencabut aduannya. Kepolisian juga dinilai tergesa-gesa menetapkan status tersangka kepada Ronny. Perspektif tentang kasus ini memang ibarat pedang bermata dua. Satu mata, kita mestinya mendorong terciptanya pemilu yang bersih, dengan melibatkan pengawasan dari berbagai sektor publik, sehingga pelapor terjadinya dugaan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Ronny mendapat jaminan perlindungan.

Dari mata pedang yang lain, sekritis apa pun pengawasan yang dilakukan, tetap harus berkoridor kecermatan, akurasi, dan data yang cukup. Namun tidak menutup kemungkinan pelaporan oleh pemantau menyimpulkan bahan-bahan temuan masyarakat, untuk kemudian menindaklanjutinya ke Panwaslu. Dan, Panwaslulah yang akan mengolah laporan-laporan tersebut, sehingga tidak akan langsung dihakimi dengan pelaporan balik ke kepolisian.

Kita berharap elemen-elemen kritis publik tetap solid, tidak dibuat gentar oleh kasus yang dihadapi Ronny. Termasuk dalam tugas mulia mengawal, mendorong, dan menciptakan atmosfer antikorupsi di tengah kehidupan masyarakat kita. Rakyat Indonesia membutuhkan makin banyak orang seperti Ronny dan komunitasnya, sebagai sosok-sosok langka, yang telah terbukti mampu menggaungkan gema perang melawan kejahatan luar biasa itu.

Opini publik untuk mendukung Koordinator KP2KKN itu harus tetap kuat. Kita jangan dilemahkan oleh unjuk kekuatan orang-orang yang punya akses ke partai politik dan lingkar kekuasaan. Tanpa rakyat, kekuasaan tidak ada artinya. Kekuasaanlah yang seharusnya dihayati dari, oleh, dan untuk rakyat, sehingga transparansi dan akuntabilitasnya harus selalu di bawah kontrol publik, yang antara lain terepresentasikan melalui para pejuang antikorupsi.

Semarangan

Kritisi politik uang, Ketua KP2KKN Jateng jadi tersangka.

Ada yang sedang kumawasa, rupanya…

* * *

SBY disarankan tak maju lagi sebagai Ketua Demokrat.

Ngunduri yuswa, mbegawan lebih bijaksana…

Sirpong

(Hanya bisa nyemangati mas Ronny Maryanto)

Brutus Mengintai Senayan

Oleh **A Adib**

"ENGKAU juga ikut serta, Brutus?" Lenguhan parau itu mengalir lemah, nyaris tak terdengar. Meski hanya sepenggal kalimat, maknanya menggema panjang menandai kelahiran stigma baru berupa pengkhianatan dunia politik kepada Julius Caesar.

Politik tak banyak membuka ruang pertemanan, pun kesetiaan. Adagium itu masih berlaku dan secara samar-samar berembus di Senayan menyusul terjadinya dualisme yang ditandai kemunculan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

Pemantik kekisruhan ini adalah tudingan terhadap sistem pemilihan pimpinan DPR dan komisi yang dinilai tidak demokratis. Pemilihan pimpinan komisi tidak demokratis karena menggunakan sistem paket. Tiap fraksi hanya bisa mengajukan satu calon. Padahal anggota tiap fraksi bisa empat orang dan mereka tidak bisa mencalonkan diri.

Kelahiran pimpinan DPR tandingan itu karena tidak terakomodasi untuk memimpin komisi membuat kisruh internal DPR. Paling tidak, walaupun DPR tandingan ini merupakan langkah politik yang tak memiliki dasar hukum, hal itu akan berdampak terhadap kinerja DPR dan mitranya, yaitu pemerintah.

Manuver KIH memang bisa menghambat kinerja pemerintahan Jokowi-JK karena beberapa kebijakan harus diputuskan bersama atau disetujui DPR. Dengan manuver KIH maka pemerintah akan dibuat sibuk karena melayani dua kekuatan di DPR. Beberapa program dan rencana pemerintah tidak akan berjalan karena "ketidakjelasan" DPR.

Langkah KIH membuat DPR tandingan memang lebih cenderung supaya bisa berkompromi dengan KMP. KIH juga pasti menyadari bahwa yang mereka lakukan pada akhirnya merugikan diri sendiri, khususnya pemerintahan yang berasal dari partainya sendiri.

Langkah KMP menyapu bersih seluruh kursi pimpinan alat kelengkapan DPR, dituding oleh KIH ada agenda politik. Ada kecurigaan bahwa KMP memiliki agenda tersembunyi terkait posisi politik pemerintahan Jokowi yang tidak mereka dukung. Kecurigaan yang menjadi pertanyaan KIH adalah motif apakah yang melatarbelakangi KMP sehingga ingin menguasai.

Penegasan itu disampaikan politikus PDIP Aria Bima. Sabtu (1/11). Berdasar pengalaman dirinya sebagai salah satu pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) 2009-2014, pimpinan itu punya kekuatan politik luar biasa terkait aspek legalitas keputusan rapat-rapat komisi dan UU APBN.

Revisi UU

Andai salah seorang pimpinan AKD menolak meneken keputusan rapat pembahasan APBN di tingkat rapat komisi maka menkeu tidak akan berani mencairkan anggaran. Selain itu, soal keputusan politik bersama Fraksi Nasdem, PKB, Hanura, dan PPP membentuk pimpinan DPR sementara sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi KMP, bukan tandingan terhadap pimpinan DPR dari KMP.

Yang perlu dilakukan KIH untuk menjadikan DPR lebih kondusif lima tahun ke depan, adalah dengan mengkritisi kinerja pimpinan DPR yang tidak sesuai dengan keputusan paripurna DPR, tatib, ataupun UU MD3. Kecurigaan kubu KIH itu dapat dimaklumi jika menyimak agenda besar KMP. Setelah memperjuangkan RUU Pelkada menjadi UU, koalisi itu masih memiliki agenda berikutnya. Tak tanggung-tanggung, ratusan UU ditargetkan direvisi.

Soal rencana mengamendemen UU, kali pertama diungkap Ketua Presidium KMP, Aburizal Bakrie dalam silaturahmi dan orientasi anggota DPR 2014-2019 di Hotel Sultan, Jakarta. Ical menyebut ada 122 UU yang harus ditinjau kembali agar bisa mengubah demokrasi Indonesia menjadi berasas Pancasila.

Program KMP dalam waktu dekat adalah mengamendemen undang-undang yang dianggap terlalu liberal dan berpihak ke asing, antara lain UU Minerba, UU Migas, UU Perbankan, dan UU Telekomunikasi. Begitu pula UU yang bersifat sosial, seperti budaya dan agama. KMP menyatakan ingin mengembalikan undang-undang sesuai dengan UUD 1945. Membenahi keadaan sekarang yang secara tidak sadar terlalu ke kanan mesti dikembalikan lagi ke tengah.

Pernyataan ini kemudian disambut baik oleh Ketua DPR Setya Novanto. Ia mendukung rencana KMP merevisi ratusan undang-undang. Menurut Setya, UU yang ada saat ini masih perlu disinkronisasi dan diharmonisasi pemerintah dan DPR (9/10).

Politikus Golkar itu menjelaskan, dalam satu tahun DPR bisa menghasilkan 20-30 undang-undang. Namun sebagian dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Berkait "teori" politik Brutus, pengamat dari UI Muhammad Budyatna mengingatkan Presiden Jokowi jangan terlalu paranoid terhadap KMP.

Dia justru perlu lebih khawatir pada jajaran internal partai pendukung dan juga Wapres Jusuf Kalla yang siap mengambil posisi Jokowi sebagai presiden

Posisi KMP sudah jelas lawan politik namun KIH adalah teman yang bisa menikam dari belakang. Dia mengingatkan Jokowi bahwa berbagai langkah blunder anggota koalisi dan berbagai kekalahan KIH terhadap KMP, bisa jadi disengaja.

Ini agar pemerintahan Jokowi tak berlangsung lama. Bisa saja nanti Jokowi dijatuhkan tapi bukan oleh KMP melainkan otaknya ada di balik pendukungnya. (10)

—AAdib, *wartawan* Suara Merdeka

Trio Macan dan Kebebasan Berpendapat

Oleh **Manunggal K Wardaya**

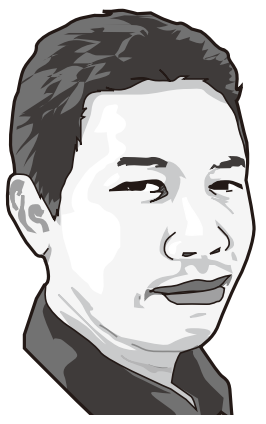

TIGA orang yang diduga administrator akun Twitter @Triomacan2000 baru-baru ini ditangkap polisi. Ketiganya, Raden Nuh, Edy Syahputra, dan Harry Koeshardjono diduga memeras petinggi PT Telkom. Di kalangan *tweople* (sebutan untuk pengguna *Twitter*), akun itu dikenal lewat aneka cuitannya terkait dengan isu-isu aktual politik. Bahkan tak segan-segan mengangkat isu bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Penangkapan tiga orang itu yang terjadi tak lama setelah penangkapan Muhammad Arsyad, tukang satai yang mengungggah gambar porno hasil editan yang menista figur Joko Widodo, menjadi hal yang menarik perhatian publik. Sejauh manakah hukum mampu menjangkau persoalan in?

Tak dapat dimungkiri kehadiran internet, termasuk media sosial, dalam kehidupan manusia menjadikan orang makin kerap dan bisa dengan cepat saling terhubung. Manusia modern tak lagi sekadar berinteraksi melalui jalur konvensional yang memiliki keterbatasan tapi juga lewat media sosial yang relatif mudah, cepat, dan murah. Dari persoalan antarpribadi hingga persoalan publik bisa dipertukarkan.

Satu cuitan Twitter bisa dengan cepat dicuitkan ulang (*retweet*) sehingga diketahui banyak orang tanpa terhalang jarak geografis. Begitu hebat persebaran informasi melalui media sosial sehingga penggunaannya untuk memengaruhi opini publik makin disadari sebagai sesuatu yang strategis.

Presiden AS Barack Obama adalah contoh figur terkemuka yang mengoptimalkan jaringan media sosial dalam menyosialisasikan visi misi politiknya semasa berkampanye pilpres. Di Tanah Air, partisipasi tinggi publik dalam Pileg dan Pilpres 2014 tidak terlepas dari peran media sosial yang memungkinkan orang lebih *involved* dalam tahapan pemilu, misal mengenai pemutakhiran data pemilih.

Angka pengguna internet yang tak kurang dari 82 juta orang pun membuat dua pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2014 memanfaatkan akun media sosial terkemuka seperti *Twitter* dan *Facebook* untuk meraih dan memelihara dukungan politik. Pemanfaatan media sosial untuk mengomunikasikan isu-isu publik adalah hal yang amat menunjang keterciptaan iklim demokrasi sekaligus berkeselarasan dengan cita-cita negara yang berkedaulatan rakyat.

Media sosial menjadi sarana bagi warga negara untuk berkomunikasi dalam aras vertikal dan horizontal, mengartikulasikan aneka pendapat dan gagasan dalam memengaruhi kebijakan publik. Kritik terhadap jalannya pemerintahan dan kinerja penyelenggara negara bisa tersebar dengan cepat dan tanpa batas. Realitas itu jadi alternatif berkait keterbatasan dan kekakuan berbagai saluran resmi dan konvensional yang ada, seperti DPR, dan berbagai institusi kemasyarakatan lain.

> Esensi tindakan berupa *public blaming* yang diikuti dengan pemerasan sebenarnya modus klasik

Melawan Hukum

Terhubungnya antarmanusia dan realitas media sosial kian menjadi media alternatif, tidak terkecuali dalam komunikasi politik, rupanya terbaca oleh sebagian pihak sebagai peluang yang menjanjikan. Jasa untuk melancarkan agenda politik, seperti kampanye melalui media sosial, juga merebak, menjadi pelengkap metode konvensional yang sudah ada.

Persoalannya, demi mencapai keuntungan, fungsi strategis media sosial acap dimanfaatkan sebagian pihak secara melawan hukum dengan menyerang martabat dan integritas seseorang/lembaga. Tujuannya mudah ditebak, yaitu memaksa pihak yang diserang untuk bernegoisasi dan memenuhi keinginan pihak penyerang, umumnya berupa uang. Modus inilah yang disinyalir dilakukan administratur akun @Triomacan2000.

Dalam kasus ini, metode kejahatan boleh saja terbilang relatif baru. Namun esensi tindakan berupa *public blaming* yang diikuti pemerasan sebenarnya modus klasik dan telah mengambil bentuk jauh sebelum tercipta dunia *cyber*. Jika hal ini yang terjadi dalam kasus akun Triomacan2000 maka tindakan seperti itu adalah perbuatan jahat dan tak bisa mendalihkan pada argumen penggunaan kebebasan berpendapat atau berekspresi.

Klaim penggunaan kebebasan berpendapat kehilangan pembenaran konstitusionalnya andai digunakan menyerang kepentingan orang lain demi kepentingan diri pribadi. Penggunaan kebebasan berpendapat bukan hak asasi yang mutlak melainkan dibatasi oleh hukum yang demokratis dan menjamin penikmatan hak orang lain. Karena itu, tindak kejahatan melalui media sosial, sebagaimana kejahatan konvensional, sudah seharusnya dan sewajarnya menjadi perbuatan yang bisa dijatuhi hukuman. (10)

— Manunggal K Wardaya, *dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, PhD researcher pada Radboud Universiteit Nijmegen Belanda*

Email Baru

Berhubung email lama mengalami gangguan, kini kirimkan artikel wacana nasional (hal 6) ke: *wacana_nasional@suaramerdeka.com*. dan: wacana.*nasional@gmail.com.* Panjang maksimal 7.000 karakter *with space*, sertakan pasfoto pose santai. (Red)

SUARA MERDEKA
Terbit sejak 11 Februari 1950

PT Suara Merdeka Press
Pendiri : H Hetami
Komisaris Utama : Ir Budi Santoso
Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Amir Machmud NS

Direktur Operasional : Hendro Basuki
Direktur Pemberitaan : Sasongko Tedjo
Direktur SDM : Sara Ariana Fiestri

Wakil Pemimpin Redaksi : Gunawan Permadi. **Redaktur Senior:** Sri Mulyadi, A Zaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo. **Redaktur Pelaksana :** Ananto Pradono, Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo. **Koordinator Liputan:** Hartono, Edy Muspriyanto. **Sekretaris Redaksi :** Eko Hari Mudjiharto **Staf Redaksi :** Soesetyowati, Cocong Arief Priyono, Zaenal Abidin, Eko Riyono, Darjo Soyat , Ghufron Hasyim, Muhammad Ali, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, Renny Martini, Diah Irawati, Agustadi,Gunarso, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Edi Indarto, Nasrudin, M.Asmu'i, Ali Arifin, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Budi Susanto, Imam Nuryanto, Arwan Pursidi, Arie Widiarto, Zulkifli Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudiyanto, M Jokomono, Saroni Asikin, Purwoko Adi Seno, Karyadi, Arswinda Ayu Rusmaladewi, Mohammad Saronji, Maratun Nashihah, Sarby SB Wietha, Mohamad Annas, Kunadi Ahmad, Ida Nursanti, Aris Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Hasan Hamid, Rony Yuwono, Sumaryono HS, M Norman Wijaya, Noviar Yudho P, Yunantyo Adi S, Fahmi Z Mardizansyah, Saptono Joko S, Dian Chandra TB, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, Tri Budianto, Wahyu Wijayanto, Leonardo Agung Budi Prasetya. **Litbang :** Djurianto Prabowo (Kepala), Dadang Aribowo. **Pusat Data, Analisa dan Produksi:** Dwi Ani Retnowulan (Kepala). **Personalia:** Sri Mulyadi (Kepala), Dyah Anggarini. **Redaktur Artistik**: Toto Tri Nugroho (Koordinator), Joko Sunarto, Djoko Susilo, Sigit Anugroho. **Kepala Pracetak:** Putut Wahyu Widodo. **Reporter Biro Semarang :** Nugroho Dwi Adiseno (Kepala), Surya Yuli Purwariyanto (wakil), Sutomo, Irawan Aryanto, Moh. Kundori, Adhitia Armitrianto, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana M Fahmi, Fani Ayudea, Hartatik, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra. **Biro Jakarta :** Hartono Harimurti, (Kepala), Wahyu Atmadji, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RM Yunus Bina Santosa, Saktia Andri Susilo, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dharmabrata, Wisnu Wijarnako. **Biro Surakarta :** Widodo Prasetyo (Kepala), Won Poerwono, Subakti A Sidik, Joko Dwi Hastanto, Bambang Purnomo, Anindito, Sri Wahyudi, Setyo Wiyono, Merawati Sunantri, Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Evi Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudin, Heru Susilowibowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto, Budi Santoso. **Biro Banyumas :** Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam, Budi Hartono, Agus Sukaryanto, RP Arief Nugroho, Agus Wahyudi, M Syarif SW, Mohammad Sobirin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. **Biro Pantura :** Trias Purwadi (Kepala), Wahidin Soedja, Saiful Bachri, Nuryanto Aji, Arif Suryoto, Riyono Toepra, Dwi Ariadi, M Achid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setiawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin. **Biro Muria :** Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Darmo, Djamal AG, Urip Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, Mulyanto Ari Wibowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi, A Adib. **Biro Kedu/DIY :** Komper Wardopo (Kepala), Doddy Ardjono, Tuhu Prihantoro, Sudarman, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholiq, Amelia Hapsari, Supriyanto, Sony Wibisono. **Daerah Istimewa Yogyakarta:** Sugiarto, Asril Sutan Marajo, Agung Priyo Wicaksono, Juili Nugroho. **Bandung :** Dwi Setiadi . **Koresponden :** Ainur Rohim (Surabaya). **Alamat Redaksi :** Jl Raya Kaligawe KM 5 Semarang 50118. Telepon : (024) 6580900 (3 saluran), 6581925. Faks : (024) 6580605. Alamat Redaksi Kota : Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon : (024) 8412600. **Manajer Iklan :** Bambang Pulunggono. **Manajer Pemasaran:** Berkah Yuliarto, **Manajer Markom:** Yoyok Gumulyo. **Manajer Riset dan Pengembangan :** Adi Ekopriyono. **Manajer TU :** Amir AR. **Manajer Keuangan :** Dimas Satrio W. **Manajer Pembukuan :** Kemad Suyadi. **Manajer Logistik/Umum :** Adi P. **Manajer HRD:** Budi Susanto. **Alamat Iklan/Sirkulasi/Tata Usaha:** Jl Pandanaran No 30 Semarang 50241. Telepon: (024) 8412600. Faks : (024) 8411116, 8447858. ■ **HOT LINE 24 JAM** 024-8454333 ■ **REDAKSI:** (024) 6580900 Faks (024) 6580605 ■ **EMAIL REDAKSI:** redaksi _ sumer@suaramerdeka.com Dicetak oleh PT Masscom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan.